

Paguyuban “*Tuk Bebeng*” dan Pengelolaan Air Berbasis Kekuatan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Merapi, Yogyakarta

Paguyuban “Tuk Bebeng” and Community Strength-Based Water Management in Disaster-Prone Areas of Merapi, Yogyakarta

*¹Reza Amarta Prayoga, ²Eko Wahyono, ³Siti Fatimah, ⁴Lis Purbandini, ⁵Djoko Puguh Wibowo

Social Welfare, Village, and Connectivity Research Center,

Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

*Corresponding author: reza.amarta.prayoga@brin.go.id

ABSTRACT Water management in disaster-prone areas such as Merapi often creates various social vulnerabilities such as social conflicts, poverty and weakened role of local organizations. The exclusion of the role of local organizations in community-based water management is often overlooked. A local community organization called *Tuk Bebeng* that work on water management in the sloop of the Merapi volcano in Yogyakarta is an example of such an overlooked role of an important actor in disaster-prone areas. This paper aims to examine the strength the *Tuk Bebeng* Association in water management in disaster-prone areas of Merapi. This research is based on a descriptive qualitative method with data collection through field observations, in-depth interviews, and focused discussion forums. The results of the study show that the *Tuk Bebeng* Association has played important roles in eliminating various sectoral conflicts of interest. This good practice is carried out through the strong base of the community's collectivity which manifest in two forms including mechanical solidarity and moral rationality. Through these roles the *Tuk Bebeng* community serves as guardians of the balance of harmony between nature and society. The pattern of life of the people around Merapi, namely *Se omah*, *Guyub*, dan *se-rahim* (common home, harmony, and the same homeland), as the glue of brotherhood can act as a damper for anger and compromise in the cross-linking of interests in water management. The practical implications of this research offer realistic practices to reduce the cross-interest (conflict) that occurs by providing space for important actors managing *Tuk Bebeng* to dialogue equally, and empowering the underrepresented Paguyuban Bebeng

ABSTRAK Pengelolaan air di daerah rawan bencana seperti Merapi, senyatanya menimbulkan pelbagai kerentanan sosial seperti konflik dalam logika pasar (korporasi), pertautan politis kepentingan negara, dan pengkerdilan peran organisasi lokal. Pengesampingan peran organisasi lokal dalam pengelolaan air berbasis masyarakat acapkali tidak anggap menjadi subjek yang vital. Tulisan ini bertujuan mengekspose kekuatan masyarakat lokal melalui Paguyuban *Tuk Bebeng* dalam pengelolaan air di daerah rawan bencana Merapi. Penelitian ini berpijak pada metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan forum diskusi terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paguyuban “*Tuk Bebeng*” sebagai organisasi non formal dalam pengelolaan air di daerah rawan bencana Merapi menjadi contoh praktik baik dalam mengeliminasi pelbagai benturan kepentingan sektoral. Praktik baik ini dijalankan melalui basis kekuatan kolektif masyarakat yang berkelindan dalam solidaritas mekanik dan rasionalitas moral yang termanifestasi dalam paguyuban “*Tuk Bebeng*” sebagai penjaga keseimbangan harmoni alam dan masyarakat. Corak hidup masyarakat di lingkaran Merapi yaitu *Se omah*, *Guyub*, dan *se-rahim* (rumah bersama, rukun, dan satu tanah kelahiran yang sama) sebagai perekat paseduluran dapat menjadi peredam amarah dan kompromistis silang pertautan kepentingan dalam pengelolaan air. Implikasi secara praktis penelitian ini menawarkan praktik yang realistis untuk meredam silang kepentingan (konflik) yang terjadi dengan memberikan ruang kepada aktor—aktor penting pengelola *Tuk Bebeng* berdialogis secara setara, dan memberdayakan aktor Paguyuban Bebeng yang

actors with legal formal and cultural recognition that *Tuk Bebeng* belongs to the Merapi community. Theoretical implications show that rationality and solidarity theories have a strong relationship in mobilising collective action in communities in disaster-prone areas.

KEYWORDS Association; Water Management; Rationality; Solidarity.

PENGANTAR

Tantangan riset pengelolaan air seringkali terlekat manifestasi sebagai sumber konflik dalam dinamika logika pasar (privatisasi) melawan kepentingan publik antara pertautan politis kepentingan negara, organisasi lokal, dan korporasi (Chaturvedi, 2013; Kåresdotter et al., 2023; Nugroho, 2017). Pengelolaan air juga menimbulkan pelbagai kerentanan sosial (sosial ekonomi, degradasi lingkungan, dan pencerabutan serta pengesampingan nilai budaya lokal) di daerah rawan bencana (Dalima et al., 2021; Dilshad et al., 2019; Kim & Gim, 2020). Kerentanan sosial acapkali menimbulkan gejala perlawanan masyarakat atas kuasa eksploitasi pasar pada sumber daya air (Yuliana et al., 2018). Kerentanan sosial di daerah rawan bencana dalam pengelolaan air menimbulkan gesekan sosial akibat tidak terakomodirnya keterlibatan pelbagai artikulasi pemangku kepentingan (negara, korporasi, dan masyarakat lokal). Gesekan ini menampakkan gejala anomali yang justru menjadi pemicu konflik di antara pihak–pihak berkepentingan (Atef et al., 2019; Pluchinotta et al., 2018; Schillinger et al., 2022; Ul-Durar et al., 2023). Pengelolaan air di daerah rawan bencana perlu mengedepankan pelibatan unsur partisipasi masyarakat lokal yang luas menjadi katalisator peredam pelbagai gejala

kurang terwakili dengan rekognisi secara legal formal dan kultural bahwa *Tuk Bebeng* milik masyarakat Merapi. Implikasi secara teoritis menunjukkan teori rasionalitas dan solidaritas memiliki keterkaitan yang kuat dalam menggerakkan tindakan kolektif pada masyarakat di kawasan rawan bencana.

KATA KUNCI Paguyuban; Pengelolaan Air; Rasionalitas; Solidaritas.

dan justru sebagai perekat relasi sosial (Firmansyah & Tuti, 2021; Mardotillah & Soemarwoto, 2017; Nurcahyono et al., 2015).

Daerah Rawan Bencana seperti di sekitar lingkaran Merapi pada erupsi tahun 2010 sudah menimbulkan dampak yang destruktif, tidak hanya sumber penghidupan masyarakat (mata pencaharian) yang tereliminasi bahkan sumber penghidupan lainnya berupa air turut hancur. Pengelolaan air menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian untuk sumber penghidupan masyarakat (Maharani, 2016). Entitas air terlekat sebagai basis nadi sumber penghidupan. Efek kehancuran di daerah rawan bencana menjadi situasional yang pelik dan kompleks problematika sosialnya. Terlebih, ketika pemulihan pasca-bencana dihadapkan dalam tantangan masyarakat untuk dapat melanjutkan dan memperkokoh daya lentingnya (L. Kurniawan et al., 2022; Mahbubah et al., 2021; Quandt et al., 2017).

Temuan Prayoga et al., (2023) menjabarkan trajektori historis keberadaan *Tuk Bebeng*, pada awalnya (tahun 1960-an) masyarakat Merapi mengalami krisis air bersih. Tahun 1965 melalui Prakarsa Pemda Kabupaten Sleman bekerjasama dengan UGM dan jaringan pendanaan WUS (*World University Service*) membangun instalasi sumber air *Tuk Bebeng*, tahun 1973 pembangunan Bak Penampung dan pipa distribusi ke tiga desa

(Kepuharjo, Umbulharjo, dan Glagaharjo). Pada tahun tersebut kelembagaan pengelolaan air belum terbentuk. Tahun 1978 Yayasan Dian Desa membangun perluasan perpipaan desa ke delapan desa (Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo, Balerante, Panggang, Sidorejo, Tegalmulyo, dan Talun), tahun ini kelembagaan *Tuk Bebeng* belum terbentuk, dan masyarakat masih bebas mengambil air tanpa ada kompensasi biaya. Tahun 2000 baru terbentuk pengelola air bernama Paguyuban “*Tuk Bebeng*”. Tahun 2006 terjadi erupsi Merapi dan Gempa yang mengakibatkan *Tuk Bebeng* mengalami kerusakan sehingga Yayasan Dian Desa merevilatisasi dan membangun bak distribusi serta jaringan perpipaan air. Tahun 2010, *Tuk Bebeng* mengalami kehancuran parah akibat bencana erupsi yang berdampak terhentinya distribusi air, pengelolaan air paguyuban *Tuk Bebeng* tidak berdaya memperbaiki kerusakan instalasi air. Puncaknya tahun 2011, bersama Yayasan Dian Desa memfasilitasi dan memperkuat eksistensi pengelolaan air Paguyuban *Bebeng* yang diketuai kepala Desa Glagaharjo. Pasca-erupsi Merapi tahun 2010, distribusi air hanya mencakup empat desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan Sidorejo).

Tuk Bebeng merupakan sumber mata air yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi (Nurhadi et al., 2018; Ratih et al., 2018; Wibowo et al., 2016). *Tuk Bebeng* yang terletak di KRB rentan destruktif jika terjadi bencana gunung meletus, awan panas, dan lahar dingin. Efek destruktif ini akan mematikan sumber mata air utama yang menghidupi ribuan makhluk hidup di sekitaran lingkaran Merapi. Kesakralan menjaga ekosistem hayati tetap lestari

(termasuk air *Tuk Bebeng*) di Gunung Merapi masyarakat kerap mempraktikkan sedekah gunung sebagai cara mitigasi berbasis *local wisdom* (H. C. Kurniawan & Setyawan, 2021). Di sisi lain, sumber mata air ini mengairi empat desa di lingkaran Merapi yang berada di dua provinsi berbeda, yaitu Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Yogyakarta, Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Panggang ketiganya termasuk Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Tuk Bebeng* dalam perjalanannya bertransformasi menjadi paguyuban yang anggotanya secara sukarela tergabung dari representasi keempat desa tersebut.

Dalam konteks pengelolaan air di Kawasan Rawan Bencana Merapi, pembentukan kelembagaan lokal dalam pengelolaan air tradisional menjadi perangkat yang penting untuk mempertahankan nilai-nilai dasar budaya lokal dan prinsip keadilan dalam mengakses sumber daya air. Pengelolaan air oleh Paguyuban “*Tuk Bebeng*” yang terbentuk dari empat desa yang berbeda secara administrasi antarkabupaten dan provinsi berlangsung damai meskipun dihadapkan kemungkinan adanya potensi konflik. Penelitian ini secara gamblang menguraikan kekuatan masyarakat melalui paguyuban sebagai organisasi non-formal menjadi model jitu pengelolaan air yang simultan di daerah rawan bencana. Kekuatan kolektivitas masyarakat yang berpilin dalam solidaritas dan rasionalitas menjadi mekanisme *value to action* (Parsons & Shils, 2017) dalam paguyuban menjaga keseimbangan masyarakat berharmoni dengan bencana alam. Kekuatan paguyuban *Tuk Bebeng* ini dibangun dalam abstraksi pandangan yang

dilandasi penguatan relasional dari nilai lokalitas khas masyarakat di lereng Merapi.

Paguyuban menjadi entitas perkumpulan sosial dalam relasional yang direkatkan pada adanya kesamaan cara pandang, rasa kekeluargaan kuat, dan rasa senasib sepenanggungan (Age, 2021; Latifah, 2021; Triwibowo, 2017). Paguyuban menjadi perangkat relasional yang terintegrasi dalam sikap solidaritas dalam suatu kelompok (Age, 2021; Shohibuddin et al., 2017). Paguyuban ini identik sebagai pengikat alami dalam relasi dan jaringan sosial seperti ikatan persaudaraan dalam mengelola interaksi sosial (Marlina et al., 2015). Bradshaw, (2008) dan Schirmer & Michailakis, (2015) menegaskan bahwa paguyuban layaknya seperti *gemeinschaft* yang berarti jaringan orang-orang dalam komunitas yang memiliki ikatan batiniah yang kuat, dan intim serta diikat bersama oleh solidaritas, identitas bersama, dan serangkaian norma (kesamaan pikiran, ikatan saudara, dan kedekatan geografis).

Paguyuban ini kemudian digerakkan melalui konseptual otoritas kepemimpinan yang bertaut dengan cara pikir Weber, yakni otoritas karismatik (Conger, 1993; Wæraas, 2018). Walaupun Weber menjabarkan tiga otoritas, yaitu tradisional, karismatik, dan legas-rasional (Muhdyanto et al., 2017). Otoritas karismatik ini dijalankan dengan adanya kekuatan pelibatan emosional dalam menampakkan kemampuan bersumber dari keteladannya yang dapat menginspirasi dan menjalarkan benefit pada para pengikutnya. Peters, (2017) lebih menegaskan pada kemampuan diri mengelola isu yang menjadi

kepentingan bersama yang dapat dijadikan otoritasnya dalam memengaruhi dan mengatur perilaku pengikutnya dengan lisan tertentu.

Dalam kacamata Durkheim terdapat dua konseptual, solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Membaca solidaritas mekanis, yaitu bercorak interaksi dan relasi sosial yang unsur lokalitas dari suatu masyarakat menjadi pengikat ekspresif kohesi sosial yang berlandaskan prinsip kedekatan emosional yang berbasis kesadaran kolektif yang sama dan kuat (Fernandez & Bande, 2018; Herzog, 2018; Towner & Lemarié, 2020). Solidaritas organik, yaitu terbentuk dari adanya perbedaan dalam relasionalnya (Herzog, 2018). Adanya struktur pembagian pelbagai latar belakang (identitas, pembagian kerja) yang interdependen dengan tatanan nilai dan pengalaman yang berbeda (Arif, 2020; Santoso & Harsono, 2014; Thijssen, 2012). Solidaritas ini lebih terbentuk karena adanya keanekaragaman antara anggota masyarakat (Hanifah, 2019). Sementara itu, dalam penelitian ini menggunakan konsep solidaritas mekanis yang menjadi instrumen pengikat kohesi sosial dalam melacak paguyuban.

Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep rasionalitas kerjasama yang dikembangkan oleh Margareth Archer (Adian, 2013), *homo economicus* atau rasionalitas ekonomi dalam sikapnya selalu memiliki pertimbangan untung rugi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Segre, 2016). Selanjutnya, *homo sentiens* atau rasionalitas moral yang secara simultan terlibat secara sosial atau

moralitas menjadi landasan bersikap dalam pengutamaan kepentingan sosial. Artinya karakter yang mampu mengonstruksi komitmen moral dalam mempertahankan pilihan atau rasionalitas untuk kepentingan keterlibatannya secara sosial dan bukan kepentingan secara pribadi (Adian, 2013; Archer & Tritter, 2000). Selisik konseptual tersebut menjadi pembungkus perspektif dalam artikel ini. Paguyuban didekati dengan konseptual solidaritas dan rasionalitas dalam meneropong telaah kerjasama pengelolaan air di daerah rawan bencana. Selain itu, kerjasama pengelolaan air berlandaskan solidaritas dan rasionalitas ini diperkuat otoritas kharismatik yang menjadi penggerak dalam paguyuban.

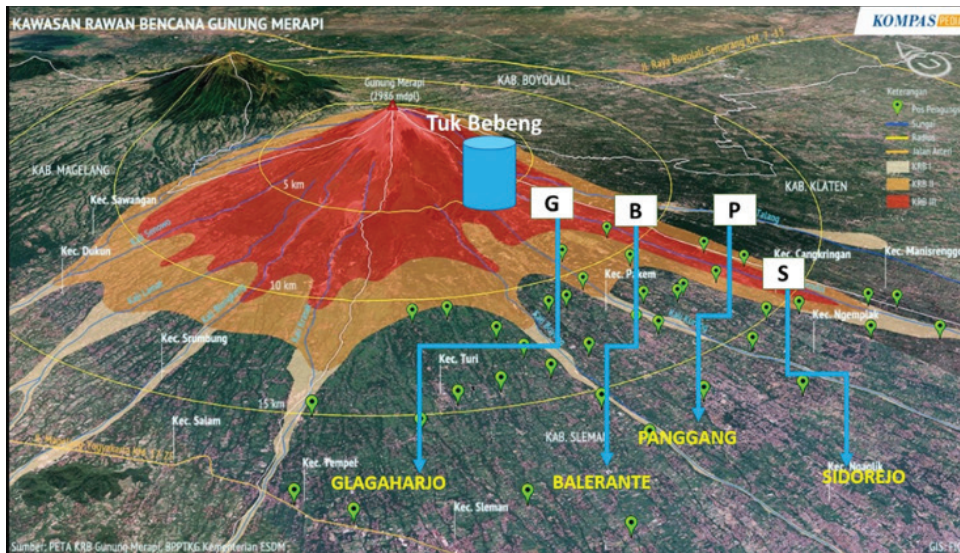
Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengekspose realitas sosial secara mendalam, luas, dan menyeluruh untuk memperoleh serta menemukan kebenaran proses sosial tentang pengelolaan air berbasis kekuatan masyarakat yang termanifestasi dalam paguyuban “*Tuk Bebeng*” di daerah rawan bencana Gunung Merapi. Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam *Tuk Bebeng*, dan pengguna air *Tuk Bebeng*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tigabelas orang, yaitu pengurus Paguyuban “*Tuk Bebeng*”, perwakilan masyarakat pengguna air dari empat desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan Sidorejo), Yayasan Dian Desa (Perintis Pembangunan *Tuk Bebeng*), Balai Taman Nasional Gunung Merapi, perangkat desa dari keempat desa tersebut, dan tokoh masyarakat desa.

Sumber data artikel ini diekstraksi dari data primer dan sekunder. Data yang terkolektif didapatkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan Forum Diskusi Terpumpun. Analisis datanya melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses penelitian (Denzin & Lincoln, 2009; Miles et al., 2019). Keabsahan datanya menggunakan triangulasi dengan sumber (Denzin, 2012; Rahardjo, 2010).

PEMBAHASAN

Paguyuban “*Tuk Bebeng*”: Organisasi Non Formal aras Lokalitas

Tuk Bebeng sebagai sumber mata air yang alirannya menghidupi sekitar belasan ribu keluarga di kaki Gunung Merapi. Sumber mata air ini menjadi nadi penghidupan dan penompang sistem kehidupan ekosistem sosial (konsumsi masyarakat, lingkungan, peternakan, dan pertanian). Aliran *Tuk Bebeng* ini tidak dikotomi wilayah administrasi (mengaliri desa sekitaran Merapi di dua Provinsi, yaitu Jateng dan DIY). Aliran *Tuk Bebeng* ini melewati empat desa, yaitu Balerante, Glagaharjo, Sidorejo, dan Panggang. Distribusi air empat desa yang bersumber dari *Tuk Bebeng* dapat dilihat pada gambar (1) dan tabel (1). Perlu diketahui bahwa Glagaharjo memiliki porsi terbesar dalam pembagian air, hal ini tidak terlepas karena *Tuk Bebeng* berada pada kawasan secara administrasi wilayah di Desa Glagaharjo. Porsi pembagian air dari *Tuk Bebeng* ini dari setiap desa (Balerante, Panggang dan Sidorejo) telah bersepakat secara aklamasi menerima pembagian air sebesar 20%.



Gambar 1 Pengairan dan Distribusi air Bersumber Tuk Bebeng di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Sumber: JP, (2020)

Empat desa ini merupakan desa yang memang berada di kaki gunung Merapi. Air memang pada dasarnya mengalir dari atas gunung Merapi tidak mengenal adanya sekat administrasi wilayah, identitas, status sosial,

dan etnis. Siapapun yang hidup di atas tanah Merapi, berarti berhak memanfaatkannya untuk penghidupan. Aliran air ini tidak boleh dibatasi karena terdapat harapan penompang kehidupan dari seluruh ekosistem di Merapi.

Tabel 1 Distribusi Sumber Air yang dikelola Paguyuban “Tuk” Bebeng

Nama Desa	Persentase Pembagian Air (Konsensus)	Distribusi Kubik Air	Pengguna Air (rumah tangga)	Dimensi Iuran, Gotong-Royong, Pemeliharaan, dan perawatan
Glagaharjo	40%	4000m ³	521 Kepala Keluarga	Sukarela
Balerante	20%	2000m ³	692 Kepala keluarga	Sukarela
Panggang	20%	2000m ³	600 Kepala Keluarga	Sukarela
Sidorejo	20%	2000m ³	1058 Kepala Keluarga	Sukarela

Sumber: Prayoga, Wahyono, Hadiyan, Fatimah, Purbandini, Listyawati, et al., (2023)

Hal ini yang menjadi perekat sosial *pareduluran* masyarakat keempat desa tersebut dalam manifestasi relasi sosial yang tercermin dalam Paguyuban “Tuk Bebeng”. *Pareduluran* ini identik sebagai mekanisme pengikat alami dalam relasi dan jaringan sosial seperti ikatan persaudaraan. *Sedulur* sebagai wujud kearifan lokal Jawa dalam mengelola interaksi sosial (Marlina et al., 2015). Biasanya nilai pengikat ini lebih kepada komitmen bersama, kesamaan cara pandang,

ikatan emosional saling memiliki, rasa ikatan persaudaraan non-biologis, dan kepercayaan sebagai perekat sosial dalam *pareduluran* (Widodo, 2014).

Paguyuban “Tuk Bebeng” Baru menjadi unit organisasi yang tumbuh atas inisiatif lokal masyarakat empat desa dalam mengelola kerjasama pemanfaatan air. Menariknya paguyuban ini bukan merupakan perangkat organik dari Pemerintah Desa, tetapi keanggotannya justru berkelindan erat

statusnya sebagai perangkat desa (kades dan sekretariat desa). Pengikat dan perekat pada organisasi ini lebih kepada pengetahuan lokal masyarakat yang beranggapan bahwa Merapi sebagai Rumah Bersama—*Se Omah*. Siapapun yang berlindung di balik Gunung Merapi dan langit yang sama, hasil alam, dan kemanfaatan dari Merapi bisa didayagunakan untuk kemanfaatan kolektif termasuk salah satunya sumber mata air dari *Tuk Bebeng*.

Kompilasi sumber—sumber kehidupan seperti air, bagi masyarakat lereng Merapi khususnya keempat desa tersebut perlu disatukan dalam wadah kesatuan komunikasi. Wadah tersebut kemudian menjadi Guyub Bebeng. Guyub artinya rukun, dan Bebeng artinya sumber air. Sumber air seperti sifatnya dapat sebagai penyejuk relasi dan pengikat sosial yang rukun. Hal inilah kemudian terwujud dalam Paguyuban *Tuk Bebeng*. Guyub Bebeng sendiri terbentuk atas keresahan masyarakat di sekitar Merapi yang sangat sulit mengakses air terlebih ancaman erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Eksistensi paguyuban ini hanya untuk memastikan bahwa air hanya diperuntukkan demi kepentingan kolektif di Merapi. Tidak diperkenankan eksploitasi berlebih dari sumber air *Tuk Bebeng* ini, terlebih komodifikasi air untuk kepentingan privat.

Status keanggotannya dalam paguyuban ini tidak mengikat, tetapi rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap *Tuk Bebeng* menjadi pengikat alami dari setiap anggota dalam penyuguban ini. Paguyuban ini tidak memiliki sistem dan mekanisme operasional organisasi normatif pada umumnya, seperti AD/ART, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta hierarki manajerial organisasi. Paguyuban ini murni sebagai

solidaritas mekanis (Schiermer, 2014; Thijssen, 2012; Towner & Lemarié, 2020) yang memang menjadi ciri khas dan identik dengan interaksi inklusi dan kolektivitas persaudaraan. Semua komponen dari perangkat paguyuban bergerak dan bekerja atas inisiatif tanpa ada disposisi legal formal. Ketika *Tuk Bebeng* mengalami kendala atau kerusakan, seluruh komponen paguyuban secara spontanitas akan berkontribusi dalam gotong-royong perbaikan *Tuk Bebeng*. Kontribusi secara swadaya itu dapat berwujud tenaga, pikiran, alat konstruksi, hingga dana.

Otoritas Karismatik ala Weber: Membaca Kepemimpinan dalam Paguyuban “*Tuk Bebeng*”

Motor penggerak komponen perangkat paguyuban ini adalah sosok Kepala Desa Glagaharjo, Suroto yang mempraktikkan legitimasinya melalui otoritas karismatik. Meminjam tipologi otoritas Weber (Conger, 1993; Wæraas, 2018) tentang otoritas karismatik yang menekankan keberhasilan menjalan otoritas karismatik dengan pelibatan emosional dan kesejarahan dari masyarakat dalam mendemonstrasikan kemampuan personalnya (kekuatan dari keteladannya) yang dapat menginspirasi orang lain (pengikutnya) sebagai *local hero* serta berkemampuan mendistribusikan benefit pada para pengikutnya. Otoritas karismatik ini dalam operasionalnya berarti kemampuan personal menangkap isu—isu komunal yang ditelaah dari kemampuan analisis situasi sosial yang kemudian dijadikan otoritasnya dapat berpengaruh mengatur perilaku pengikutnya dengan ucapan tertentu (Peters, 2017).

Suroto dengan praktik otoritas karismatiknyanya sangat menjadi figur pemimpin yang didengar oleh masyarakat dan para kepala desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan Sidorejo). Sosok Suroto juga dianggap sebagai sosok sangat berpengaruh dalam Paguyuban “*Tuk Bebeng*”. Suroto dengan kemampuan personal dan ucapannya dapat memobilisasi massa hanya dengan diksi otoritas seperti *ayo bergerak perbaiki Tuk Bebeng*. Istilahnya hanya dengan kiriman petikan pesan di Grup *Whatsapp* dan pesan suara maka massa dari Balerante hingga Sidorejo dapat langsung bergerak koordinatif untuk memperbaiki *Tuk Bebeng* jika terjadi kerusakan. Kemampuan mobilisasi massa inilah yang berkelindan erat dari figur Suroto yang memang dinilai oleh pengikutnya sebagai sosok yang karismatik. Pemimpin dan aktor seperti Suroto dalam relasi kuasa lokal menjadi simbol pengikat paseduluran dalam warga masyarakat Paguyuban “*Tuk Bebeng*”. Menariknya, tampuk kepemimpinan Paguyuban ini hanya dapat dipegang oleh figur yang ditokohkan masyarakat berasal dari desa Glagaharjo. Hal ini sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis dari aktor pengelola Paguyuban dari Desa Balerante, Panggang, dan Sidorejo.

Tuk Bebeng berasal dari Rahim “Mbah Merapi”: sumber penghidupan perekat paseduluran

Distribusi air *Tuk Bebeng* juga berlandaskan akar paseduluran dari satu akar atau rahim “*mbah*” Merapi yang sama. Artinya mereka yang disekitaran Merapi ini lahir dan hidup memang dari tanah yang sama yakni Gunung Merapi. Air dan seluruh penompang ekosistem di Merapi memang menjadi klaim

asal usul dari masyarakat di sekitaran Merapi. Terlebih ada klaim persoalan atas nama pelestarian cagar *geopark* dari negara yang membuat *Tuk Bebeng* masuk dalam wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Klaim yang dianggap sepihak ini memunculkan resistensi masyarakat di sekitaran Gunung Merapi, karena tidak mempertimbangkan hak ulayat dan historis *Tuk Bebeng* yang sejatinya memiliki akar kuat lahir batin dari masyarakat di sekitaran Merapi. Klaim ini juga menimbulkan gejolak konflik laten antara masyarakat dan TNGM. Sementara itu, masyarakat sekitaran Merapi meyakini bahwa jika terjadi eskalasi konflik terbuka dengan TNGM maka akan terjadi kesialan berupa Kualat jika mengenggangi sejarah masa lalu *Tuk Bebeng*. Setidaknya, TNGM perlu melakukan pertimbangan historis *Tuk Bebeng* sebagai pemilik “sah” dari masyarakat empat desa yang dialiri *Tuk Bebeng* tersebut.

Di sisi lain, dalam perspektif religi, sumber air diciptakan untuk manusia, dan air menjadi sumber kehidupan (Munawaroh, 2020). Air dalam penegasannya secara kultural adalah menjadi sumber penghidupan dan pengikat relasi kebersamaan masyarakat (Mardotillah & Soemarwoto, 2017). Bahkan, ditempat lain, tidak sedikit juga air menjadi sumber konflik antara masyarakat, negara, dan korporasi (Atef et al., 2019; Chaturvedi, 2013; Darbandsari et al., 2020; Spash, 2022). Hal yang berbeda justru terjadi di *Tuk Bebeng* Merapi, air menjadi praktik sumber penghidupan dan perekat *paseduluran*. Praktik baik ini muncul dari ikatan relasional yang diwujudkan dalam Paguyuban *Tuk Bebeng*. Paguyuban yang secara khusus legitimasinya mengelola air

Tuk Bebeng lereng Merapi. *Tuk Bebeng* ini bukan menjadi kontestasi praktik kuasa elit local, tetapi menjadi ajang menunjukkan kerelaan mengabdikan untuk sesama. Mereka yang terlibat dalam paguyuban ini tidak mendapatkan insentif apapun dan hanya mengedepankan prinsip keikhlasan untuk menolong sesama. Prinsip paguyuban ini sama seperti air, yaitu murni mengalir kemana saja, memberi tanpa melihat apapun, dan siapapun dapat memperoleh manfaatnya. Landasan inilah yang menjadi *core value* kerjasama pengelolaan dalam Paguyuban “*Tuk Bebeng*”.

Praktik Kerja Paguyuban “*Tuk Bebeng*” dalam pengelolaan air: Mediator Peredam Bara

Prinsip kerja rasa *Paseduluran* menghiaskan praktik organisasi lokal informal Paguyuban “*Tuk Bebeng*” ini. Komunikasi egaliter, distribusi benefit berkeadilan, dan ruang diskursif tanpa represif menjadi kunci Paguyuban “*Tuk Bebeng*” ini eksis hingga sekarang. *Sa’roso – Sa’rupo* menjadi landasan paguyuban ini dalam mengelola air. Perasaan serasa senasib sepenanggungan termuat dalam pengelolaan air oleh paguyuban air menjadi penyejuk yang tidak menimbulkan segregasi sosial dalam pemanfaatan air *Tuk Bebeng* Merapi. Ketakutan kolektif yang menghantui para pengurus Paguyuban itu adalah jikalau air *Tuk Bebeng* diambil alih korporasi melalui jalur regulasi negara. Pemerintahan lokal desa dan masyarakat yang terlibat kelindan dalam paguyuban ini merasa akan tidak berdaya dan rentan mengekstraksi praktik kuasa dominasi dari korporasi dan negara. Ketika itu terjadi

dan sudah dijustifikasi melalui aturan legal formal, maka kami akan tergilas lemah dan kalah dalam klaim pengelolaan air. *Sa’roso – Sa’rupo* terus internalisir dan diwariskan ke kepengurusan Paguyuban selanjutnya, untuk menjadi tameng alami dalam mempertahankan hak atas daulat air di *Tuk Bebeng*.

Di sisi lainnya, praktik pengelolaan air banyak menimbulkan disrupsi dan konflik manifes yang berkepanjangan (Abbott et al., 2017; Al-Muqdad, 2019; Gleick, 1993; Grover, 2007; Zou et al., 2018). Bahkan ketika air dikomodifikasi dan menjalar masuk ranah privat korporasi yang berorientasi benefit, justru akan menimbulkan gejala pertentangan atas daulat air milik masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliana et al., (2018) yang memotret gejala perlawanan masyarakat Padarincang atas praktik korporasi Aqua Danone yang dianggap masyarakat sebagai penjajahan (kompeni) model baru dalam eksploitasi sumber air. Kekuatan modal uang dan kekuasaan menjadikan korporasi tersebut leluasan melakukan ekspansi dan eksploitasi sumber air tanpa mempertimbangkan daulat hak asasi masyarakat atas air. Hal ini menunjukkan bahwa absen dan nihilnya eksistensi pengelolaan air berbasis lokal di masyarakat, sehingga gejala demikian tidak menjadi mediasi yang dapat melindungi daulat atas air oleh masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan air oleh Paguyuban “*Tuk Bebeng*”, diharapkan dapat menjadi senjata berkekuatan kolektif dari masyarakat keempat desa, jikalau harus melawan “kekuatan besar” yang akan mengambil alih dan merampas sumber air

di *Tuk Bebeng* dari masyarakat. Paguyuban ini senyatanya dapat menjadi pilihan rasional ketika terjadi gejolak perampasan atas daulat air oleh pihak–pihak yang ingin mengeksploitasi air. Pada prinsipnya, air milik masyarakat seharusnya dikembalikan untuk kepentingan kolektif masyarakat.

Pengelolaan air berbasis sistem instalasi *water meter* pada awalnya memunculkan friksi di tengah masyarakat di Lereng Merapi. Senyatanya, Instalasi tersebut sebenarnya hanya untuk menjaga “roso keadilan” dalam penggunaan air di masyarakat. Selain itu, *water meter* ini juga sebagai pencegah praktik penyelewengan beberapa oknum dalam penggunaan air berlebih. Tujuannya hanya satu yakni keadilan dan pemerataan air bagi masyarakat. Kutipan iuran memang diberlakukan dalam konteks pemeliharaan pipa dan *Tuk Bebeng*. Iuran ini sebenarnya berbiaya lebih murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan penggunaan melalui jalur PDAM dan sejenisnya. Iuran ini juga berprinsip sesuai dengan penggunaan air oleh rumah tangga.

Realitasnya masih ada oknum masyarakat berpandangan sinis terhadap pemberlakuan *water meter* karena dianggap sebagai “*aji mumpung*” memperoleh keuntungan dari Paguyuban “*Tuk Bebeng*” ini. Jika pengelolaan air ini tidak diberikan pada pengelola air berbasis lokal maka akan membuka peluang korporasi mengambil alih yang justru “berefek domino” menyengsarakan masyarakat lokal sebagai pemilik air. Skema pengelolaan bersama sumber daya air dengan pelibatan unsur lokal (birokrasi lokal) atau organisasi sejenis paguyuban, dapat menjadi pengendali kerjasama pengelolaan sumber

daya air antara negara, dan korporasi. Skema pelibatan unsur lokal dalam pengendali kerjasama pengelolaan yang demikian dapat menjamin kepastian proteksi kepentingan publik atas air (Nugroho, 2017).

Mekanisme Pengelolaan Air yang Partisipatif dalam Paguyuban “Tuk Bebeng”

Pengelolaan air berbasis masyarakat menjadi jalan kuratif dalam meredam pelbagai gejolak friksi antara masyarakat, negara, dan korporasi. Paguyuban “*Tuk Bebeng*” sebagai organisasi lokal non formal dapat menjadi refleksi bagaimana air dapat dikelola tanpa menimbulkan segregasi sosial. Kehidupan masyarakat di sekitar lereng Merapi yang mempraktikkan kehidupan guyub “*se-omah*” memiliki nilai mendasar berdampingan serasi antara alam dan manusia. Gunung Merapi dan tanah suburnya serta air yang menyeruak dari celahan Merapi memberikan penghidupan untuk mereka yang merasa dari rahim “mbah merapi”. Air *Tuk Bebeng* tidak dilihat hanya sekedar entitas pelepas dahaga, tetapi menjadi unit hidup yang dapat menghidupi ekosistem sekelilingnya. Sifat air yang cair dan mengairi alirannya menjadi landasan relasi kultural masyarakat Merapi bahwa hidup itu harus cair dan tidak boleh keras. Artinya hati dan pikiran haruslah cair dapat merasuk kemana saja dan siapa saja, sedangkan keras, tidak boleh berkeras hati, dan pikiran ke sesama makhluk hidup.

Disesuaikan dengan sifat air itulah, Paguyuban “*Tuk Bebeng*” mempraktikkan kerja air yang luwes, cair, dan menjadi sumber hidup bagi siapa saja. Mekanisme yang berprinsip pada cara kerja “air” diadopsi oleh paguyuban ini. Di mana eksistensi paguyuban

dapat menjadi penguat sistem kehidupan masyarakat di empat desa, yaitu Balerante, Glagaharjo, Sidorejo, dan Panggang. Adopsi cara kerja Paguyuban “*Tuk Bebeng*” ini berdasar temuan lapang (empiris) meliputi tiga postulat kunci.

Pertama, adanya kontrol dari paguyuban terhadap pengelolaan air. Kontrol ini meliputi perencanaan partisipatif dan deliberatif yang merujuk pada temuan Fitriyah et al., (2024), Allain et al., (2020) dan Pirsoul & Armoudian, (2019), diskursif dari temuan sebelumnya dan temuan lapang bahwa keempat desa yang dialiri *Tuk Bebeng* menerapkan kontrol paguyuban dalam pengelolaan air melalui perencanaan partisipatif yang deliberatif, dimana ada asistensi kolektif terkait rumusan kegiatan futuristik pemeliharaan *Tuk Bebeng*, dan manajerial bersama perangkat desa.

Kedua, muatan aksi kolaborasi, seluruh keputusan dan tindakan dari gerak Paguyuban “*Tuk Bebeng*” berorientasi adanya pemahaman bersama dalam pengelolaan air.

Ketiga, transformasi rencana ke aksi dan pemulihan. Hal ini berkaitan dengan implementasi perencanaan pengelolaan *Tuk Bebeng* menjadi aksi–aksi kolaborasi yang unsur pelibatan masyarakat luas sebagai subyek utamanya.

Ketiga regulasi berupa nilai–norma yang disepakati bersama ini dalam pengelolaan air Paguyuban “*Tuk Bebeng*” sebenarnya tidak tertulis, hanya menjadi kesadaran bersama (*collective consciousness*) sebagai pengatur perilaku masyarakat dan pengurus *Guyub Bebeng* dalam pentingnya keberlanjutan memelihara *Tuk Bebeng*.

Kelindan Solidaritas Sosial dan Rasionalitas Moral

Persoalan pengelolaan air *Tuk Bebeng* di wilayah hukum Konservasi TNGM menyisakan potensi konflik laten dan terbuka. Segregasi sosial antara pengelola *Tuk Bebeng* dan TNGM dapat menjadi konflik yang efek dominonya akan sama-sama merugikan kedua belah pihak. Tidak ada yang diuntungkan dari potensi gesekan ini. Paguyuban “*Tuk Bebeng*” sebagai pengelola sah air *Tuk Bebeng* selama ini bertindak dengan pemicu interaksi paseduleran, kini dikotomi oleh regulasi TNGM yang secara otoritas melihat pemanfaatan air ini bertentangan dengan prinsip regulasi konservasi TNGM. Masyarakat keempat desa yang tergabung dalam paguyuban *Tuk Bebeng* lalu bereaksi atas aksi klaim sepihak dari TNGM tanpa meng–indahkan klausul asal usul dalam UU Desa (klaim pihak desa) atas air yang senyatanya mengairi penghidupan puluhan ribu masyarakat di sekitar lereng Merapi. Pertautan ini kemudian dalam bahasa konflik seperti benturan kepentingan antara pihak TNGM dan masyarakat Paguyuban *Tuk Bebeng*. TNGM melihat *Tuk bebeng* di wilayah konservasi pemanfaatannya tidak boleh melebihi batas minimal pemanfaatan air sesuai tertuang dalam regulasi konservasi. Sementara itu, pemanfaatan sumber air ini bagi pengelola *Tuk Bebeng* adalah demi kemaslahatan penghidupan ekosistem sosial di lereng Merapi. Pengkotoman ini jika terus ada pembiaran maka terindikasi berpotensi konflik secara terbuka.

Tentunya prinsip dari kedua pihak yang bertentangan ingin adanya konsolidasi dalam mencari kebuntuan. Kebuntuan dengan

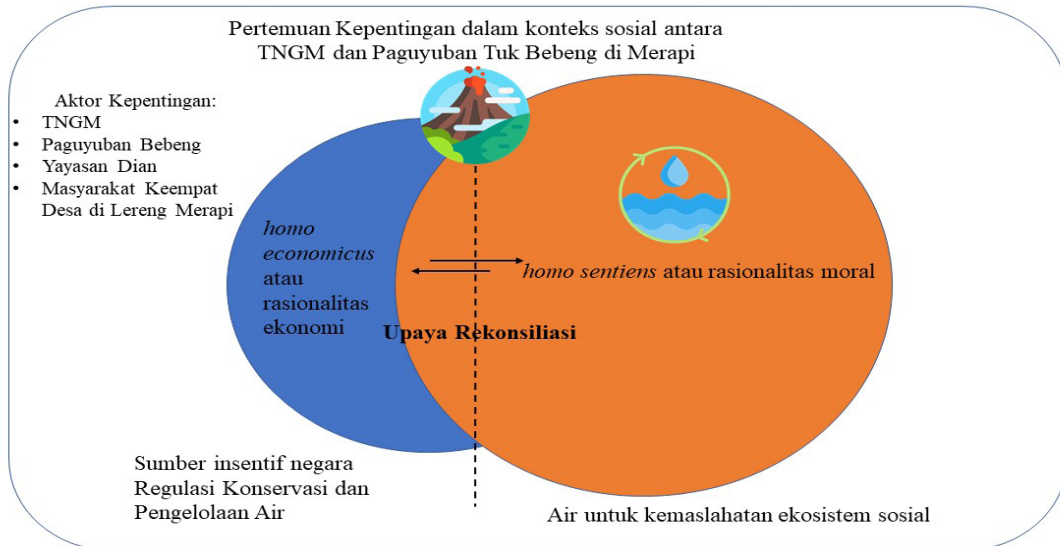
solusi paripurna diharapkan dari kedua pihak, sama—sama tidak bertentangan dengan regulasi konservasi dan asas kemaslahatan masyarakat Merapi dalam penggunaan air tuk bebeng. Dalam pendalaman data di lapangan, ada solusi yang dianggap paripurna untuk sengketa ini, solusi ini memang diakui masih rentan dan terlalu dini untuk dianggap sebagai cara solutif. Setidaknya ini menjadi upaya yang konsolidatif dalam meracik harmoni dalam silang kepentingan pengelolaan air baik dari pihak TNGM selaku representasi negara dan Paguyuban “*Tuk Bebeng*” selaku pengelola mata air bebeng sebagai berikut.

Pertama, upaya ini tidak jauh dari corak hidup masyarakat Jawa yang berfilosofis *se-omah*, *guyub*, dan *se-rahim Merapi*. Dalam gerak pikir Durkheim membaca solidaritas mekanis bercorak interaksi dan relasi sosial yang unsur lokalitas dari suatu masyarakat menjadi pengikat ekspresif kohesi sosial yang berlandaskan prinsip kedekatan emosional yang berbasis kesadaran kolektif yang sama dan kuat (Fernandez & Bande, 2018; Herzog, 2018; Towner & Lemarié, 2020). Corak hidup ini disinyalir sebagai landasan nilai inti dalam solidaritas mekanis, solidaritas yang mengedepankan prinsip paseduluran yang diikat dan dilekatkan karena kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini tumbuh berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa yang masih terpatri di interaksi masyarakat lereng Merapi, yaitu *se-omah*, *guyub*, dan *se-rahim*.

Kedua, upaya rekonsiliasi melalui penguatan rasionalitas peredam benturan kepentingan berprinsip moralitas. Berpijak dalam kerangka pikir sosiolog Margareth Archer (lihat Adian, 2013), manusia dalam kesehariannya bukan *homo economicus*

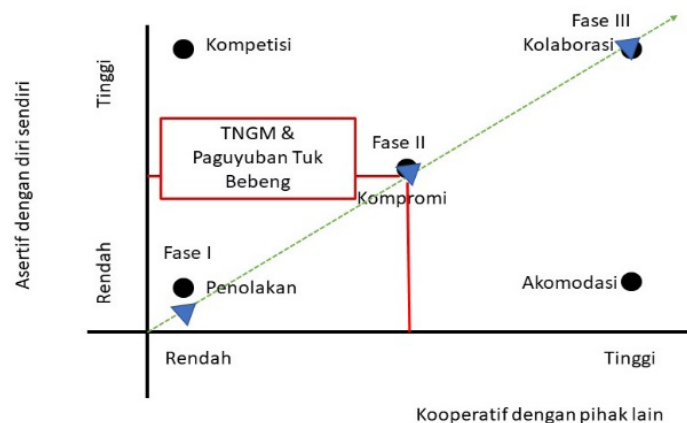
atau rasionalitas ekonomi yang selalu memiliki pertimbangan untung rugi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Segre, 2016). Individu manusia adalah *homo sentiens* yang secara simultan terlibat secara sosial (Archer & Tritter, 2000). Artinya karakter yang mampu mengkonstruksi komitmen moral dalam mempertahankan pilihan atau rasionalitas untuk kepentingan keterlibatannya secara sosial dan bukan kepentingan secara pribadi (Adian, 2013). Moralitas menjadi landasan bersikap untuk rasional terhadap pengutamaan kepentingan sosial yang terlebih untuk kemaslahatan. Dalam konteks air, antara pengelola “*Tuk Bebeng*” dan TNGM masih terdapat “ruang” rasionalitas moral dalam melihat air *Tuk Bebeng* sebagai inti penghidupan ekosistem sosial lereng Merapi. Jika ini dipikirkan dalam pertentangan kepentingan maka rekonsiliasi antara Pengelola air *Tuk Bebeng* dan TNGM akan terkonsensus atas nama moralitas “air untuk kemaslahatan ekosistem sosial” lereng Merapi. Memenuhi kepentingan kolektif bukanlah tujuan dari *homo economicus* melainkan *homo sentiens* yang senantiasa berakar pada konteks sosial. Pelibatan aktor yang teridentifikasi berkepentingan dalam meredam benturan kepentingan *Tuk Bebeng* di Merapi, yaitu TNGM, Paguyuban “*Tuk Bebeng*”, Yayasan Dian, dan Masyarakat keempat desa di lereng Merapi. Eksistensi aktor yang teridentifikasi ini menjadi penting karena untuk mengetahui perkara yang berbenturan dalam memperoleh konteks sosial utuh *Tuk Bebeng* baik dari segi historis, kondisi riil, dan pemanfaatan *Tuk Bebeng*. Berikut skema operasional rasionalitas moral dalam meredam benturan kepentingan (lihat Gambar 2).

Skema Kerja Rasionalitas Moral Peredam Benturan Kepentingan



Gambar 2 Skema Kerja Rasionalitas Moral Peredam Benturan Kepentingan

Sumber: Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023



Gambar 3 Skema Kompromi sebagai Jalan Tengah

Sumber: Adopsi dan modifikasi pemikiran Liliweri, (2005) dengan Hasil Analisis Temuan Peneliti, 2023

Air Peredam “Bara”: Suatu Tawaran Kompromi sebagai Jalan Tengah Pertautan Konservasi dan Pengelolaan Air

Salah satu tawaran model penyelesaian konflik adalah kompromi. Hal ini didasarkan bahwa seluruh pertautan kepentingan yang mendasari pertentangan ini adalah ketidaksesuaian persepsi antara kepentingan

para aktor. Kompromi di sini memang masih akan menyisakan ketidak-enakan menerima keputusan dari pihak yang bertentangan, tetapi setidaknya dari perspektif Liliweri, (2005) turut mempertegas bahwa kompromi dengan kalimat kunci yaitu *both win some, lose some*. Bertitik tolak dari pandangan yang sama setiap pihak yang terlibat pertentangan

konflik dalam memberikan porsi kepentingan sama dan *equal* dalam setiap kompromi dengan perbedaan. Tawaran model kompromi ini dirasa sebagai jalan tengah dalam meminimalisir konflik terbuka antara masyarakat desa di Merapi dengan TNGM (lihat Gambar 3) strategi mengurangi harapan, tawar-menawar, memberi dan menerima, dan memecahkan.

Ada dua hal yang menjadi penekanan pada skema di atas, fase pertama adanya rasa asertif dan saling kooperatif antarpihak berkonflik. Jika kedua hal ini menjadi niatan dari sebuah awal kompromi maka akan ada kelancaran dalam membuka diri untuk meluruskan ketegangan selama ini antara TNGM dan Paguyuban “*Tuk Bebung*”. Dalam mencapai adanya konsensus melalui kompromi, setidaknya diawali fase penolakan (fase pertama). Pada fase ini pihak yang bertentangan akan berkuat dengan argumentasi masing–masing dalam konflik. Ada pengutamakan kepentingan dari masing–masing pihak yang terjebak dalam ketidaksepahaman (hal bisa jadi dalam mengurai *Tuk Bebung* dalam kerangka hak atas asal-usul ataupun *Tuk Bebung* yang masuk dalam wilayah konservasi TNGM).

Fase kedua, pihak yang berkonflik perlu mencapai titik kompromi dengan asas *equal, both win some, and lose some*. Dalam kompromi ini tidak ada pihak yang merasa paling benar atau menang, kedua pihak akan merasa terbuka dirinya untuk saling menerima dan kooperatif dengan pihak–pihak lain. Eskalasi ini perlu ditinggikan pada kepentingan yang lebih besar dari kedua pihak yang bertikai, yaitu “air untuk kemaslahatan ekosistem sosial”. Ketika ada kepentingan besar yang melatari konteks sosial dari konflik

ini maka akan ada pertemuan kompromi untuk mengurangi ego kepentingan dari masing–masing pihak. Tidak ada pihak yang dimenangkan dan dirugikan dari kompromi ini, tetapi dapat setidaknya kompromi ini menjadi pengakomodir pertautan kepentingan dari para pihak yang berkonflik. Fase dua ini menjadi langkah penentu untuk ke fase tiga, yakni kolaborasi. Berkolaborasi dalam pengelolaan air dengan berprinsip konservasi dan otonom khusus ke pengelola “*Tuk Bebung*” menjadi jalan tengah yang tepat, disamping dengan pendampingan TNGM dengan asertif, berimbang, dan *equal*. Tawaran jalan tengah melalui kompromi ini bukanlah satu-satunya solutif dari persoalan pengelolaan air *Tuk Bebung* di Merapi, tetapi kompromi ini lebih elastis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dinamika sosial, dan eskalasi konflik yang terjadi antara TNGM dan Paguyuban “*Tuk Bebung*”. Tawaran ini menjadi hasil refleksi peneliti dalam telaah hasil temuan lapang, dan sifatnya hanya rekomendasi yang tidak mengikat. Berpijak pada corak hidup masyarakat Jawa di lereng Merapi, *Sa’ roso, Sa’ rupo-sa’ omah* dapat menjadi jalan tengah yang kompromis kedepannya antara TNGM dan Paguyuban “*Tuk Bebung*”. Dalam langit dan Rahim *mbah Merapi* yang sama, dapat dikulik akar historis air dari sumber *Tuk Bebung* sebagai perekat *paseduluran*.

SIMPULAN

Dalam temuan artikel ini, pengelolaan air berbasis paguyuban lokal seperti “*Tuk Bebung*” menjadi basis yang digerakkan oleh kekuatan masyarakat. Paguyuban “*Tuk Bebung*” sebagai Organisasi nonformal aras lokalitas, yang muncul dari adanya kesepemahaman

pengetahuan lokal masyarakat bahwa Merapi sebagai Rumah Bersama—*Sa' Omah*. Sumber air yang dikelola oleh *Tuk Bebeng* senyatanya didayagunakan untuk kemanfaatan kolektif masyarakat di sekitaran lingkaran Merapi. Terlebih, paguyuban ini juga dapat menjadi tameng dari kepentingan privat dan tindakan komodifikasi serta eksploitasi berlebih sumber mata air *Tuk Bebeng*.

Pengelolaan air dari Paguyuban "*Tuk Bebeng*" tidak dapat dilepaskan dari adanya otoritas kharismatik yang menjadi kunci dalam solidaritas mekanis dan rasionalitas kerjasama di antara keempat desa. Kepemimpinan kharismatik dalam relasi kuasa lokal menjadi simbol pengikat *pareduluran* dalam warga masyarakat paguyuban "*Tuk Bebeng*". Kerjasama pengelolaan air dalam Paguyuban ini direkatkan adanya kepentingan bersama dan kerelaan mengabdikan untuk sesama. Paguyuban "*Tuk Bebeng*" bukan menjadi ajang kontestasi praktik kuasa elit lokal. Keterlibatan para aktor dalam relasional paguyuban ini tidak mendapatkan insentif apapun dan hanya mengedepankan prinsip keikhlasan untuk menolong sesama. Prinsip paguyuban ini diibaratkan layaknya air, yaitu murni mengalir kemana saja, memberi tanpa melihat apapun, dan siapapun dapat memperoleh manfaatnya.

Kelindan solidaritas sosial dan rasionalitas moral sebagai suplemen pengikat relasional Paguyuban "*Tuk Bebeng*" berdasarkan kesadaran kolektif dan perekat *pareduluran* berlandaskan nilai filosofis masyarakat Jawa yang masih terpatrit di interaksi masyarakat lereng Merapi, yaitu *se-omah*, *guyub*, dan *se-rahim*. Moralitas menjadi dasar sikap untuk rasional dalam pengutamakan kepentingan kemaslahatan sosial terutama

dalam pengelolaan air oleh paguyuban "*Tuk Bebeng*". Mekanisme pengelolaan air pada *Tuk Bebeng* di Merapi berprinsip partisipatif atas deliberatif kepentingan bersama dari keempat desa (Glagaharjo, Balerante, Panggang, dan Sidorejo) menjadi corak hidup masyarakat yang lekat dengan *pareduluran* Merapi. Tidak hanya itu, perekat *pareduluran* yang diyakini paguyuban "*Tuk Bebeng*" dapat menjadi jalan tengah kompromistis dalam meredakan silang pertautan kepentingan dalam pengelolaan air. Kembali pada prinsip "dalam kesatuan langit dan Rahim mbah Merapi yang sama", yaitu air dari sumber *Tuk Bebeng* sebagai perekat *pareduluran*. Kelindan solidaritas mekanis dan rasionalitas moral sebagai kekuatan kolektif yang termanifestasi dalam paguyuban "*Tuk Bebeng*" sejatinya sebagai penjaga alami harmoni alam dan masyarakat dalam kontingensi bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan secara tulus atas pengayaan perspektif dalam penulisan naskah ini kepada Yayan Hadiyan, Haryati, dan Andayani Listyawati dalam diskursus teoritik dan empiris serta pengalaman riset yang membersamai ekstraksi data primer lapangan dalam memperkaya temuan. Terima kasih juga kepada OR TKPEKM dan PR KSDK BRIN dalam mendukung riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M., Bazilian, M., Egel, D., & Willis, H. H. (2017). Examining the food–energy–water and conflict nexus. *Current Opinion in Chemical Engineering*, 18, 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.coche.2017.10.002>
- Adian, D. G. (2013). *Rasionalitas Kerjasama: Sebuah Teori Rekonsiliasi Sosial*.

- Koekoesan. <https://books.google.co.id/books?id=507cDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=1QrDLs5f4Q&dq=RasionalitasKerjasama%3ASebuahTeoriRekonsiliasiSosial&lr=&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=RasionalitasKerjasama:SebuahTeoriRekonsiliasiSosial&f=false>
- Age, M. Y. C. (2021). REVITALISASI ATMA REKSA: Wujud Integrasi Solidaritas Rasul Awam. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 6(1), 10–16. <https://doi.org/10.53949/ar.v6i1.121>
- Al-Muqdad, S. W. H. (2019). Developing strategy for water conflict management and transformation at Euphrates–Tigris basin. *Water*, 11(10), 2037. <https://doi.org/10.3390/w11102037>
- Allain, S., Plumecocq, G., & Leenhardt, D. (2020). Linking deliberative evaluation with integrated assessment and modelling: A methodological framework and its application to agricultural water management. *Futures*, 120, 102566. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102566>
- Archer, M., & Tritter, J. (2000). Rational choice theory. In *Resisting Colonization*. Routledge. <https://www.routledge.com/Rational-Choice-Theory-Resisting-Colonisation/Archer-Tritter/p/book/9780415242721>
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Atef, S. S., Sadeqinazhad, F., Farjaad, F., & Amatya, D. M. (2019). Water conflict management and cooperation between Afghanistan and Pakistan. *Journal of Hydrology*, 570(January), 875–892. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.075>
- Bradshaw, T. K. (2008). The post-place community: Contributions to the debate about the definition of community. *Community Development*, 39(1), 5–16. <https://doi.org/10.1080/15575330809489738>
- Chaturvedi, A. K. (2013). *Water: a source for future conflicts*. Vij Books India Pvt Ltd. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ywOqCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=water+and+source+conflict&ots=5_YK_DBfWZ&sig=iBKu3tnyYhgRjTgYhaItTkrEz18&redir_esc=y#v=onepage&q=waterandsourceconflict&f=false
- Conger, J. A. (1993). Max Weber's conceptualization of charismatic authority: Its influence on organizational research. *The Leadership Quarterly*, 4(3–4), 277–288. [https://doi.org/10.1016/1048-9843\(93\)90035-R](https://doi.org/10.1016/1048-9843(93)90035-R)
- Dalima, R., Pratiknjo, M. H., & Damis, M. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Program PNPM Dalam Pemanfaatan Air Bersih di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Holistik, Journal Of Social and Cultural Anthropology*, 14(3), 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/35418>
- Darbandsari, P., Kerachian, R., Malakpour-Estalaki, S., & Khorasani, H. (2020). An agent-based conflict resolution model for urban water resources management. *Sustainable Cities and Society*, 57(February), 102112. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102112>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative research*. In Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Dilshad, T., Mallick, D., Udas, P. B., Goodrich, C. G., Prakash, A., Gorti, G., Bhadwal, S., Anwar, M. Z., Khandekar, N., & Hassan, S. M. T. (2019). Growing social vulnerability in the river basins: Evidence from the Hindu Kush Himalaya (HKH) Region. *Environmental Development*, 31, 19–33. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.12.004>
- Fernandez, G., & Bande, M. (2018). Rainforestation Implementation and

- Durkheim's Notion of Mechanical Solidarity: From the Experiences of the Pioneering Adopters of the Cienda San Vicente Farmers Association in Baybay City, Leyte. *Journal of Agriculture and Technology Management*, 21(1), 8–16. <http://jatm.ctu.edu.ph/index.php/jatm/article/view/212>
- Firmansyah, F., & Tuti, R. W. D. (2021). Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 125–131. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1616>
- Fitriyah, N., Yuniarti, T., Wahyono, E., Prayoga, R. A., & Fatriani, R. M. (2024). Clean Water Issues, Community Behavior and Communication Models in Sustainable Development Goals 6 in Banten West Java Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(1), 247–258. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190123>
- Gleick, P. H. (1993). Water and conflict: Fresh water resources and international security. *International Security*, 18(1), 79–112. <https://doi.org/10.1162/isec.18.1.79>
- Grover, V. I. (2007). *Water: A source of conflict or cooperation?* Science Publishers, Inc. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093075811>
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro. *Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 13(1), 41–74. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02>
- Herzog, L. (2018). Durkheim on Social Justice: The Argument from Organic Solidarity. *American Political Science Review*, 112(1), 112–124. <https://doi.org/10.1017/S000305541700048X>
- JP, S. (2020). Peta Tematik Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/kawasan-rawan-bencana-gunung-merapi>
- Kåresdotter, E., Skoog, G., Pan, H., & Kalantari, Z. (2023). Water-related conflict and cooperation events worldwide: A new dataset on historical and change trends with potential drivers. *Science of the Total Environment*, 868(January). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161555>
- Kim, J., & Gim, T.-H. T. (2020). Assessment of social vulnerability to floods on Java, Indonesia. *Natural Hazards*, 102, 101–114. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03912-1>
- Kurniawan, H. C., & Setyawan, B. W. (2021). Upacara Adat Sedekah Gunung sebagai Sarana Mitigasi Bencana Letusan Gunung Merapi berbasis Local Wisdom. *Al Kawnu: Science and Local Wisdom Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.18592/ak.v1i1.5087>
- Kurniawan, L., Zauhar, S., & Maarif, S. (2022). STRENGTHENING COMMUNITY RESILIENCE AT BALERANTE VILLAGE, KLATEN REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE (STUDY CASE: MERAPI VOLCANO HAZARD). *Journal of Management Information & Decision Sciences*, 25(3), 1–12. <https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15247252&AN=157171269&h=4UaK8W%2BNbhm2kgx%2BBu%2FTMDfk6tRVBaXX0ZuWR2SY1kUmRkSneNLEtHHEFdcFKX8UQEuafu2NXG7qKG4dXr4Tvw%3D%3D&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlnotAuth&crlhashurl=login.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost%26scope%3Dsite%26authtype%3Dcrawler%26jrnl%3D15247252%26AN%3D157171269>
- Latifah, A. N. (2021). Upaya Paguyuban Manunggal Karso (PMK) dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat di Bantaran Sungai Gajah Wong Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi*

- Pembangunan Sosial, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.113>
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Maharani, D. P. (2016). Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Arena Hukum*, 9(1), 32–52. <https://doi.org/10.21776/ub.arena-hukum.2016.00901.3>
- Mahbubah, N. L., Rizki, M. F., & ... (2021). Community Development as Disaster Risk Reduction Efforts through the Disaster Resilient Village (Destana) Program in Nganjuk Regency. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 4(1), 60–76. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.13116>
- Mardotillah, M., & Soemarwoto, R. S. (2017). Ngaruat Cai: Sebuah Pengikat Kebersamaan Di Cirateun. *HUMANIKA*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/humanika.v24i1.16062>
- Marlina, E., Ronald, A., & Dharoko, A. (2015). Pasar Sebagai Ruang Seduluran Masyarakat Jawa. *Humaniora*, 27(1), 81–95. <https://doi.org/10.22146/jh.6412>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth)*. Arizona State University. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/239700221402800402?journalCode=gjha>
- Muhdyanto, F., Pranawa, S., & Nurcahyono, O. H. (2017). Analisis Teori Otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus tentang Kepemimpinan Lokal Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). *Jurnal Pend. Sos Ant*, 8(1), 1–18. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/12715>
- Munawaroh, S. (2020). *Pengelolaan air perspektif hadis [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/35488/>
- Nugroho, H. S. (2017). PERAN BIROKRASI LOKAL DALAM SKEMA PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA AIR. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 80–85. <https://doi.org/10.14710/jiip.v1i2.1622>
- Nurcahyono, A., Syam, H., & Sundaya, Y. (2015). Hak atas air dan kewajiban negara dalam pemenuhan akses terhadap air. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 389–398. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1477>
- Nurhadi, N., Suparmini, S., & Ashari, A. (2018). Strategi penghidupan masyarakat pasca erupsi 2010 kaitannya dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(1), 59. <https://doi.org/10.22146/mgi.29129>
- Parsons, T., & Shils, E. A. (2017). *Toward a general theory of action: Theoretical foundations for the social sciences*. Routledge. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=spcuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=related:hi5oxGcIG6AJ:scholar.google.com/&ots=ZOH_ccJB Fu&sig=_tM8E8rV7QC41ka0iAnrwles T5A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Peters, R. S. (2017). Authority. In *Power, Authority, Justice & Rights* (1st ed., pp. 60–73). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315127170-5/authority-peters>
- Pirsoul, N., & Armoudian, M. (2019). Deliberative democracy and water management in New Zealand: a critical approach to collaborative governance and co-management initiatives. *Water Resources Management*, 33, 4821–4834. <https://doi.org/10.1007/s11269-019-02400-x>
- Pluchinotta, I., Pagano, A., Giordano, R., & ... (2018). A system dynamics model for supporting decision-makers in irrigation water management. *Journal of Environmental Management*, 223,

- 815–824. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.06.083>
- Prayoga, R. A., Wahyono, E., Hadiyan, Y., Fatimah, S., Purbandini, L., Haryati, Listyawati, A., & Wibowo, D. P. (2023). INTER-VILLAGE COOPERATION IN WATER RESOURCES MANAGEMENT: A NEW SOCIAL INSTITUTIONAL PROCESS IN VOLCANIC DISASTER-PRONE AREAS. *Water Conservation and Management*, 7(2), 137–147. <https://doi.org/10.26480/wcm.02.2023.137.147>
- Prayoga, R. A., Wahyono, E., Hadiyan, Y., Fatimah, S., Purbandini, L., Listyawati, A., & Wibowo, D. P. (2023). INTER-VILLAGE COOPERATION IN WATER RESOURCES MANAGEMENT: A NEW SOCIAL INSTITUTIONAL PROCESS IN VOLCANIC DISASTER-PRONE AREAS. *Water and Conservation Management*, 7(2), 137–147. <https://doi.org/10.26480/wcm.02.2023.137.147>
- Quandt, A., Neufeldt, H., & McCabe, J. T. (2017). The role of agroforestry in building livelihood resilience to floods and drought in semiarid Kenya. *Ecology and Society*, 22(3). <https://doi.org/10.5751/ES-09461-220310>
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Ratih, S., Awanda, H. N., Saputra, A. C., & Ashari, A. (2018). Hidrogeomorfologi mataair kaki Vulkan Merapi bagian selatan. *Geo Media: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 16(1). <https://doi.org/10.21831/gm.v16i1.20977>
- Santoso, S., & Harsono, J. (2014). Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Angkringan Di Kota Ponorogo. *Sosiohumaniora*, 16(1), 87–96. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5685>
- Schiermer, B. (2014). Durkheim's Concept of Mechanical Solidarity: Where Did It Go? *Durkheimian Studies*, 20(1), 64–88. <https://doi.org/10.3167/ds.2014.200104>
- Schillinger, J., Özerol, G., & Heldeweg, M. (2022). A social-ecological systems perspective on the impacts of armed conflict on water resources management: Case studies from the Middle East. *Geoforum*, 133(May), 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.05.001>
- Schirmer, W., & Michailakis, D. (2015). The lost Gemeinschaft: How people working with the elderly explain loneliness. *Journal of Aging Studies*, 33, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2015.02.001>
- Segre, S. (2016). Rational Choice Theory. In *Contemporary Sociological Thinkers and Theories* (p. 23). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9781315573946-13/rational-choice-theory-sandro-segre>
- Shohibuddin, M., Cahyono, E., & Bahri, A. D. (2017). Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi? *Wacana*, 19(36), 29–81. <https://insistpress.com/wp-content/uploads/2017/12/Wacana-36-Kajian-2-Shohibuddin-Cahyono-Bahri.pdf>
- Spash, C. L. (2022). Conservation in conflict: Corporations, capitalism and sustainable development. *Biological Conservation*, 269(November 2021), 109528. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109528>
- Thijssen, P. (2012). From mechanical to organic solidarity, and back: With Honneth beyond Durkheim. *European Journal of Social Theory*, 15(4), 454–470. <https://doi.org/10.1177/1368431011423589>
- Towner, N., & Lemarié, J. (2020). Localism at New Zealand surfing destinations: Durkheim and the social structure of communities. *Journal of Sport & Tourism*, 24(2), 93–110. <https://doi.org/10.1080/14775085.2020.1777186>
- Triwibowo, A. (2017). STRATEGI PAGUYUBAN “REPUBLIK NGAPAK” DI JAKARTA DALAM MEMBENTUK SOLIDARITAS DAN IDENTITAS SOSIAL (*Studi Kasus*

- Komunitas Masyarakat “Ngapak” di Jakarta) [UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA]. <http://repository.unj.ac.id/25276/>
- Ul-Durar, S., Shah, M., De Sisto, M., & Arshed, N. (2023). Metabolic rift theory and the complexities of water conflict between India and Pakistan: A pathway to effective environmental management. *Journal of Environmental Management*, 347(April), 119164. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119164>
- Wæraas, A. (2018). On Weber: 19 Legitimacy and Legitimation in Public Relations. In *Public relations and social theory* (pp. 18–38). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315271231-2/weber-arild-wæraas>
- Wibowo, D. P., Warsono, S. H., Mujianto, & Purbantara, A. (2016). KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR DESA DI DAERAH RAWAN BENCANA. PT. Sulaksana Watinsa Indonesia. https://www.academia.edu/download/60554071/CETAK_Kebutuhan_Pelayanan_Dasar_Desa_Di_Daerah_Rawan_Bencana20190910-24142-9hwrt2.pdf
- Widodo, A. S. S. (2014). *Modal Sosial dalam Pengelolaan Bank Sampah* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/68740>
- Yuliana, N., Dimiyati, I., & Ismanto, I. (2018). GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT PADARINCANG MELAWAN RENCANA EKSPLOITASI SUMBER DAYA AIR OLEH DANONE AQUA. *Jurnal Inovasi*, 12(2), 35–75. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/618>
- Zou, Y., Duan, X., Xue, Z., Mingju, E., Sun, M., Lu, X., Jiang, M., & Yu, X. (2018). Water use conflict between wetland and agriculture. *Journal of Environmental Management*, 224(June), 140–146. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.052>